

SEPUTAR PENGELOLAAN DESA WISATA

Oleh

D. Purwanggono

(Dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta)

RINGKASAN

Seiring dengan hiruk – pikuk munculnya pengelolaan desa wisata untuk kegiatan wisata beberapa waktu terakhir ini, seiring dengan itu pula telah muncul berbagai persoalan atas manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Desa wisata dengan nilai jualan potensi daya tarik yang asli, otentik, dan unik pelan tetapi pasti tergores oleh kepentingan wisata tanpa mengindahkan kepedulian terhadap lingkungan. Konflik sosial, konflik masyarakat, konflik kepentingan telah pula muncul ke permukaan.

Seperti yang terjadi di beberapa desa, komitmen untuk menjadikan desa wisata lebih mudah dari pada mengelolanya. Upaya untuk membangun dan mengembangkan desa wisata sebaiknya mempertimbangkan peran masyarakat, identifikasi dan pengkajian potensi, kelembagaan dan sistem pengelolaan, produk dan pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan peran pemilik kebijakan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas, upaya membangun dan mengembangkan desa wisata dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat atas pengelolaan wisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: Desa Wisata, pengelolaan, pariwisata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerolehan manfaat ekonomi atas pengembangan desa wisata telah membuat dampak positif dan negatif bagi masyarakat di lingkungan desa wisata. Sebagian masyarakat berubah sikap/perilaku yang tidak baik. Dahulu 'desa itu' tenang, teduh, "guyub – rukun", dan menyejukan tidak hanya oleh variasi vegetasi, kehidupan sosial bermasyarakat, tetapi juga oleh sikap dan perilaku yang "polos", sopan serta santun menurut cara pedesaan. Kini "desa itu" berubah sejak masuknya kegiatan wisata. Mendatangkan "wong kutho" (orang kota) ke

desa tetapi tidak ketemu "wong ndeso" di desa itu merupakan bentuk kesalahan apabila desa itu sepakat menjadi desa wisata. Bentuk – bentuk persaingan baik antar individu maupun kelompok yang terjadi di desa dengan intensitas potensial menimbulkan konflik akan dapat mengakibatkan melemahnya pengelolaan desa wisata yang pada gilirannya desa wisata itu akan "mangkak" tak terurus atas konflik-konflik dimaksud, demikian pula persoalan adanya "desa wisata" di dalam "desa wisata". Peran faktor eksternal bisa juga mempengaruhi pengelolaan desa wisata,

apabila ia tidak terpandu dengan baik bisa menimbulkan intervensi – intervensi atau bahkan tindakan yang eksploratif dengan mengesampingkan aspek lingkungan dalam arti yang luas.

Mendatangkan wisatawan sebanyak – banyaknya ke desa wisata tanpa memperhatikan kapasitas pendukung yang melingkupi desa wisata itu merupakan tindakan yang melanggar konsep “eko wisata” yang mestinya melekat pada pengelolaan desa wisata. Penambahan fasilitas dan pelayanan demi mendatangkan wisatawan sebanyak – banyaknya ke desa dengan menerjang “harmonisasi” tata ruang lingkup desa adalah juga bukan tindakan bijak.

Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Suatu gejala yang melukiskan kepergian orang – orang di dalam daerah atau negara sendiri, atau penyeberangan orang – orang pada tapal batas daerah atau negara. Proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi – interaksi dan hubungan – hubungan. Dari sinilah kemudian pariwisata harus benar – benar dapat menjadi instrumen untuk pemerolehan pengalaman (sosial, spiritual, edukatif) dan kenangan yang menyenangkan.

Pengamalan Sapta Pesona Pariwisata oleh masyarakat di desa wisata akan menjadi sajian yang menarik dan mempesona bagi wisatawan. Namun pengamalan itu harus berjalan secara paralel dengan pemerolehan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan desa wisata sangat lekat dengan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya melibatkannya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek. Pengamalan Sapta Pesona Pariwisata menjadi kebutuhan bukan yang dipaksakan, diperintahkan. Pariwisata pedesaan dapat dipahami sebagai pariwisata dengan daya tarik kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya. Potensi daya tarik alam, potensi daya tarik budaya yang khas mempunyai peluang untuk mengundang wisatawan datang. Kehidupan desa itu sendiri merupakan objek sekaligus subjek kepariwisataan, meski tidaklah mudah mewujudkan suatu wilayah sebagai kawasan atau daerah tujuan wisata pedesaan. Haruskah

oleh karenanya perjalanan panjang ditempuh bagi keberadaan desa wisata? Kesadaran masyarakat akan kepemilikan potensi, kemampuan mengelolanya, kesanggupan akan melestarikan lingkungan dalam arti yang luas merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui bagi keberadaan desa wisata, disamping aspek-aspek lain yang melingkupi seperti: peran masyarakat, identifikasi dan pengkajian potensi, kelembagaan dan sistem pengelolaan, produk dan pemasaran, sumber daya manusia, peran pemilik kebijakan.

Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan dalam Upaya Membangun dan Mengembangkan Desa Wisata

Inilah beberapa hal yang terkait dengan introduksi yang sekiranya dapat mereferensi upaya membangun dan mengembangkan desa wisata.

1. Peran masyarakat

Pengelolaan desa wisata berbasis pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat bukan pemerdayaan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran masyarakat adalah tidak hanya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek. Kesanggupan pengelolaannya yang didukung oleh komitmen segenap penghuninya harus benar-benar dapat menyuguhkan atau menyajikan “atmosfir” alam pedesaan yang mengesankan, menyenangkan. Pertanyaannya adalah: (1) Apakah memang benar tidak begitu mudah mendidik masyarakat yang tidak terbiasa dengan kehidupan pedesaan dan bertani menjadi kelompok pengelola usaha pariwisata? (2) Apakah memang benar kalangan terpelajar di desa sulit atau tidak tertarik untuk mengelola desanya termasuk untuk kegiatan pariwisata? Kalau memang demikian, jawabannya adalah:

- Diperlukan motivator dengan tindakan persuasif penuh kesabaran untuk mengajak mengarahkan masyarakat agar mampu mengelola usaha pariwisata di desanya tanpa harus meninggalkan

profesi atau pekerjaan yang telah dilakukannya.

- Daya tarik yang dapat diberikan kepada kalangan terpelajar agar mampu dan mau mengelola desanya termasuk untuk kegiatan pariwisata, antara lain; adalah: Diberi kesempatan untuk mengabdikan kependaiannya di desa sebagai bentuk kepedulian demi “kemajuan” desanya, yang menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat tanpa mengabaikan “lingkungan”.

Pengabdian itu misalnya dalam bentuk manajemen info, pembuatan atau pengemasan produk, promosi dan pemasaran yang harus menggunakan teknologi komunikasi atau media terkini. Peran mereka harus mendapat apresiasi secara memadai. Mereka bisa berperan sebagai pemandu wisata profesional walau secara *free lance* atau *part time*, di samping sebagai penyedia layanan jasa-jasa pariwisata yang dibutuhkan.

Sangatlah disarankan peran masyarakat dapat dipandu dengan Peraturan Desa (Perdes) yang akan mengarahkan jalannya penyelenggaraan kegiatan desa wisata. Dan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan manajemen “rembugan” atas dasar musyawarah untuk mufakat.

2. Identifikasi dan pengkajian potensi

Hasil dari identifikasi dan pengkajian potensi adalah berupa Buku Panduan informasi pariwisata yang bermakna, mudah dipahami, dan menarik, meyakinkan. Buku panduan ini berisi berbagai hal tentang pengelolaan desa wisata baik yang sifatnya informatif maupun aplikatif berupa info-info penawaran produk. Panduan ini selanjutnya dapat menjadi sarana promosi dan pemasaran yang sifatnya *accessible* (mudah diakses) secara “*on line*” maupun manual. Data dan informasi yang ada di dalam panduan tersebut harus senantiasa di “*update*” agar berjalan seiring dengan perubahan atau perkembangan.

3. Kelembagaan dan sistem pengelolaan

Diperlukan Lembaga Pengelola yang “kredibel” dengan sumber daya manusia yang memiliki penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan etika yang dibutuhkan oleh tindakan pengelolaan desa wisata. Struktur kelembagaan dapat meliputi; misalnya:

- Pembina/ Penasehat
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Koordinator bidang

Selanjutnya sistem pengelolaan akan berada pada lingkup penjelasan, sebagai berikut:

- Nama pengelola
- Badan Hukum
- Alamat dan “*Contact Person*”
- “*Office Hour*”

Disamping itu diperlukan pula informasi tentang denah lokasi/*setting* tata ruang:

- Peta petunjuk
- Arena Atraksi
- Pengemasan Rute
- Tempat Parkir
- Tempat Kedatangan/Keberangkatan
- Arena Belanja/Souvenir
- Sekretariat dan pusat layanan informasi (desa wisata).

Penjelasan atau kesepakatan mengenai investasi/pengadaan dana pengelolaan, hak dan kewajiban pengelola, pengelolaan keuangan (termasuk pembagian keuntungan), dan lainnya yang melingkupi merupakan perihal penting pula di dalam kelembagaan dan sistem pengelolaan.

4. Produk dan pemasaran

Produk wisata adalah fasilitas atau pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Produk itu dapat berupa objek dan atraksi wisata, akomodasi (misal: *homestay*), transport (sarana kendaraan), pengadaan kebutuhan makan/minum, souvenir, dan lain-lain. Produk itu dapat dikemas menjadi satu-kesatuan pengemasan, namanya paket wisata. Daya tarik pengemasannya merupakan hal penting untuk promosi dan

pemasaran. Produk dapat disusun berdasarkan alokasi waktu (*product by time*),

atau produk berdasarkan tema kegiatan (*product by theme*).

Perhatikan kolom berikut ini:

NAMA PRODUK	DESKRIPSI	DURASI WAKTU	ALUR KUNJUNGAN	MINIMUM PAX	HARGA PER PAX

Persyaratan dan kondisi

- Harga termasuk
- Harga tidak termasuk
- Pembatalan
- Pembayaran
- Alamat dan “*contact person*”

Berbagai aktifitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan untuk menuntun sepanjang perpindahan produk menuju pasar disebut perencanaan pasar. Hasilnya merupakan rencana pemasaran yang memuat dan mendeskripsikan strategi pasar, canal distribusi, dan upaya-upaya agar produk

dapat bergerak menuju pasar secara efisien dan efektif.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan asset penting bagi organisasi pengelolaan kegiatan usaha, termasuk pengelolaan desa wisata. Keberadaan Sumber Daya Manusia akan menentukan maju tidaknya organisasi bisnis tersebut.

Perhatikan kolom program pelatihan Sumber Daya Manusia berikut ini:

PROGRAM	SASARAN
<p>Pelatihan pengembangan kualitas pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reliability</i> Melalui program familiarisasi (pengenalan) potensi desa wisata 2. <i>Responsiveness</i> Melalui program pengembangan <i>grooming, attitude, smile</i>. 3. <i>Assurance</i> Mengarah pada standar pelayanan yang memadai dan pasti, profesional, dapat dipercaya. 4. <i>Emphaty</i> Melalui pengembangan program “<i>Guest is the first thing to think</i>” 5. <i>Tangible</i> Melalui program pengembangan GRADES (<i>grooming, attitude, smile</i>) 	<p>Peningkatan apresiasi dan pemahaman SDM terhadap pentingnya keberadaan desa wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang dapat diandalkan dari segi pemahaman produk (<i>product knowledge</i>) tentang desa wisata secara menyeluruh 2. SDM yang cepat tanggap akan kebutuhan dan keinginan pengunjung, sebelum mereka menyatakannya. Ramah, santun, dan penuh rasa hormat. 3. Standar pelayanan yang diberikan SDM berkenaan dengan informasi, pemanduan wisata, rasa aman dan nyaman pengunjung (wisatawan) 4. SDM yang memiliki keinginan dan semangat untuk melayani (<i>willingness to serve</i>) yang tidak kecil terhadap wisatawan 5. Penampilan fisik SDM yang dapat dilihat dari tampilan pakaian yang dikenakan, kebersihan SDM secara fisik yang dapat dinilai secara langsung oleh wisatawan.

(Manajemen pengembangan, 2011)

6. Peran Pemilik kebijakan

Dalam hal ini pemilii kebijakan antara lain adalah Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Kecamatan, Kelurahan. Peran mereka adalah sebagai pihak yang memotivasi dan menstimulasi penyelenggaraan kegiatan (pengelolaan) desa wisata.

MEMBUAT DAN MENGELOLA DESA WISATA

Apa yang ingin mengemuka berikut ini bertujuan mengingatkan kembali bahwa; membuat dan mengelola desa wisata itu hendakna memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengertian

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan:

- Yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya, dan kemasyarakatan.
- Yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik, serta terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisatawan.

2. Prinsip-prinsip Desa Wisata

- Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat desa setempat.
- Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, bukan merusaknya.
- Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian.
- Memberdayakan masyarakat desa wisata.
- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan.

3. Komponen Utama Desa Wisata

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata, yakni:

- Akomodasi

Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

- Atraksi

Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta seting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, misalnya: kursus tari, membuat, *handycraft*, dan lain-lain yang spesifik.

4. Kriteria Desa Wisata

Pada pendekatan ini diperlukan kriteria yang dapat meliputi:

- Atraksi Wisata

Yaitu; semua yang mencakup alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang apaling menarik dan atraktif di desa.

- Jarak tempuh

Adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari pusat kota. Kemudahan jangkauannya akan meringankan pencapaiannya.

- Besaran Desa

Menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Karakteristik ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.

- Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan

Merupakan aspek penting mengingat adanya aturan – aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.

- Ketersediaan infrastruktur

Meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dll.

(Desa Wisata, 2010)

SURAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN DESA WISATA

1. Maksud/ Arahan

Dengan maksud agar pembentukan dan pengelolaan desa wisata yang tidak sedikit melibatkan anggota masyarakat pendukungnya dapat berjalan sebagaimana mestinya, terarah/ terpandu atas kreatifitas dan solidaritas serta keterlibatan sosial yang tumbuh atau ditumbuhkan maka, diperlukan semacam surat keputusan pengukuhan dari pemerintah (Gubernur/Bupati) atas keberadaan desa wisata.

Selanjutnya surat keputusan pengukuhan dari pemerintah ini diarahkan untuk:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan desa wisata. Pariwisata pedesaan adalah pariwisata dengan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri – ciri khusus dalam masyarakatnya.
- Membangun generasi muda berkenaan dengan pentingnya daya baca dan daya paham generasi dimaksud terhadap pelestarian, pengelolaan, pun pemeliharaan desa wisata yang melingkupi budaya dan alam desa itu.
- Menumbuh – kembangkan sikap apresiasi masyarakat terhadap potensi daya tarik alam dan budaya.
- Dapat berupaya “mendiskripsikan” dan “mendistribusikan” berbagai hal terkait dengan produk wisata berbasis potensi wisata pedesaan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
- Dapat berupaya untuk senantiasa peduli terhadap masa depan desa untuk pengelolaan/pengembangan wisata. Dengan demikian masyarakat lebih tergerak hatinya untuk bertanggung jawab melestarikan dengan menjual desa tanpa kehilangan desanya.
- Menghimpun berbagai masukan untuk menyusun dan mengembangkan

kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan pengembangan desa wisata yang sejalan dengan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Persyaratan

Bagi masyarakat yang ingin membentuk, mengelola desanya menjadi desa wisata harus memiliki surat keputusan Pengukuhan dari pemerintah (Gubernur/Bupati) dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain; sebagai berikut:

- Desanya memiliki daya tarik yang asli, otentik, dan unik berciri khas pedesaan/perkampungan.
- Memiliki sumber daya manusia dan lembaga yang mumpuni untuk mengelola desanya.
- Memperoleh daya dukung yang sungguh – sungguh dari masyarakat yang dapat terpresentasikan melalui pengamalan sapta pesona pariwisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah – tamah, dan kenangan).
- Memiliki sarana/prasarana penunjang yang memadai. Misal: sekretariat, akses, MCK, *homestay*, kesenian, tempat pentas, penunjang atraksi, papan nama/ petunjuk, sarana teknologi informasi.
- Memiliki aktifitas sebagai upaya tindakan pengelolaan yang “kredibel” dan laku “jual”. Mampu melakukan atau membuat pelatihan, pengemasan produk wisata, kegiatan usaha, Data kunjungan, marketing dan promosi, “*net – working*”.
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan di maksud, siap dan sanggup dilakukan penilaian oleh pihak yang “berwenang” dengan apa adanya.
(Dinas Pariwisata Dan Budaya. DIY, 2012)

3. Tahapan Pembentukan

- Tahap Awal

Adalah melakukan tindakan identifikasi tentang desa yang akan dijadikan desa wisata.

- Tahap berikut
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap implementasi (pengamalan) Sapta Pesona Pariwisata sebagai daya tarik jualan utama desa wisata, kualitas dan kuantitas potensi.
- Tahap Operasional
Bobot/kualitas pengelolaan desa wisata, upaya pelestarian, berwawasan lingkungan, upaya pengembangan.
(selanjutnya lihat lampiran sebagai upaya implementasi – operasional pengelolaan desa wisata).
(Desa Wisata, 2011)

SEKILAS TENTANG KONSEP PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT

Unsur penting dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Untuk itulah pemberdayaan masyarakat harus benar-benar terpandu dengan baik guna mensejahterakan masyarakat. Masuknya pihak eksternal atau investor sangat tidak disarankan karena dapat mengurangi “pemberdayaan masyarakat” dimaksud. Yang dibutuhkan adalah motivator yang seharusnya berasal dari dalam desa itu sendiri, atau dari luar yang “tidak pamrih” karena benar-benar mengabdikan untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat menjadi pengelola desa wisata yang baik.

Pemberdayaan masyarakat sangat memungkinkan masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktifitas mereka sehari-hari. Bentuk-bentuk keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan desa wisata; antara lain, sebagai berikut:

- Sebagai penyedia jasa akomodasi (*homestay*)
- Sebagai penyedia kebutuhan makan/minum
- Sebagai penyedia jasa transport lokal
- Sebagai penyedia jasa pertunjukan/kesenian
- Sebagai penyedia souvenir/cinderamata
- Sebagai pemandu, dan lain-lain.

KESAN DAN PESAN ATAS PENGELOLAAN DESA WISATA SELAMA INI

1. Kesan
 - a. Atraksi
Terkesan tidak sedikit desa wisata yang memiliki atraksi atau daya tarik wisata yang mirip dan kurang eksploratif. Kualitas, variasi dan keunikan masih berada pada posisi kurang menggembirakan. Semakin berkualitas dengan pelayanan dan fasilitas yang memadai, semakin bervariasi atraksinya, dan unik akan semakin menyedot daya pikat serta daya tarik wisatawan.
 - b. Amenitas
Pengadaan fasilitas pendukung relatif masih perlu ditingkatkan dalam upaya untuk membuat daya tarik obyek wisata semakin menarik bagi wisatawan. Peningkatan pengadaan fasilitas pendukung hendaknya tetap memperhatikan aspek kelokalan dan “atmosfere” pedesaan. Fasilitas itu misalnya toilet, parkir, papan petunjuk, arena pentas kesenian, pusat layanan info, kebutuhan “*meals*”; dan instrumen-instrumen lain yang diperlukan untuk kunjungan wisata.
 - c. Aksesibilitas
Diperlukan upaya koordinasi antar pengelola desa wisata untuk “memfamiliarikan” atau memperkenalkan produk-produk desa wisata dengan tindakan pemasaran yang “*terintegrated*”. Perlu kerja sama dengan para pemangku

kepentingan untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk desa wisata. Barangkali perlu dibimbing untuk kemudian diajak untuk kegiatan-kegiatan bursa pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program “kemitraan” untuk pemasaran pun dapat disarankan.

d. Kelembagaan

Lembaga pengelola desa wisata selama ini masih terkesan “tradisional”. Masih diperlukan pelatihan-pelatihan agar lembaga pengelola desa wisata dengan segenap jajarannya yang terlibat di dalam manajemen dapat berdaya dan berhasil-guna atas pengelolaan desa wisata yang baik, diikuti dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap visi dan misi yang diembannya.

e. Investasi

Pengelolaan desa wisata pastilah membutuhkan dana (investasi). Selama ini yang terjadi pengadaan dana berasal dari desa, bantuan (misal PNPM), dan sebagian desa wisata dengan “koperasi”. Peran pemerintah, swasta, masyarakat barangkali dibutuhkan akan tetapi harus tetap menjaga hak dan kepentingan masyarakat sebagai subjek maupun objek dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa itu.

2. Pesan

a. Produk

- Dalam pengembangan atraksi dan obyek desa wisata sangat urgensi adalah tingkat kelangkaan dan keasliannya. Karena dengan obyek wisata yang langka dan masih asli mendorong wisatawan berkeinginan untuk berkunjung untuk mendapat pengalaman baru. Disamping itu untuk menjaga agar wisatawan tidak jenuh perlu adanya variasi obyek wisata dan atraksi di setiap desa wisata.
- Penyusunan paket-paket wisata yang terpadu dari atraksi dan obyek wisata

yang ada, seperti pentas budaya, jamuan makan tradisional, dan lain-lain sesuai dengan kondisi setiap desa wisata dengan prinsip pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang datang sehingga mereka memperoleh kenyamanan, kesenangan dan kenangan.

- Segala pengembangan atraksi dan obyek wisata yang ada tetap diupayakan untuk mempertahankan fungsi kelestarian dan daya dukung lingkungan.

b. Fasilitas

- Pengembangan fasilitas wisata perlu disesuaikan dengan karakteristik obyek wisata dan budaya masyarakat setempat, agar nuansa alami dan keasliannya dapat terjaga dengan baik.
- Segala bentuk pengembangan fasilitas wisata budaya diupayakan tidak merusak lingkungan dan kelestarian budaya masyarakat setempat.

c. Akses

- Dibutuhkan upaya untuk peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kondisi akses setiap desa wisata.
- Dalam pengembangan sarana dan prasarana harus tetap menjaga fungsi kelestarian dan daya dukung lingkungan.

d. Pemasaran

- Pemasaran potensi wisata diawali dari kesiapan produsen oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah penyebaran informasi even – even yang sudah ada seperti bentuk kesenian, adat tradisional, serta pengenalan produk – produk kerajinan, tanaman, maupun usaha lainnya yang menunjang daya tarik desa wisata.
- Meningkatkan kegiatan latihan untuk persiapan dalam berbagai jenis lomba sebagai daya tarik awal untuk menghidupkan suasana desa wisata.

- Membuat rencana jadwal kegiatan untuk dasar kerjasama dengan instansi terkait, kemudian meyebarkannya paket wisata dalam kurun bulanan, semesteran atau tahunan.
- e. Kelembagaan dan masyarakat
- Keberadaan kelembagaan pengelola desa wisata merupakan peran yang strategis dalam percepatan pengembangan desa wisata. Untuk itu perhatian dan dukungan instansi terkait berupa legalisasi kelembagaan bagi yang sudah terbentuk, sedangkan yang belum perlu adanya fasilitasi dari instansi terkait dalam pembentukan kelembagaan tersebut.
 - Berjalan tidaknya kepengurusan lembaga pengelola, terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya kegiatan yang rutin dalam rangka menumbuhkan rasa kepedulian dan partisipasi yaitu dengan pelatihan-pelatihan tentang paradigma kepariwisataan maupun keorganisasian.
 - Mendorong kemitraan lembaga pengelola desa wisata dengan pihak-pihak terkait seperti Asita, PHRI, HPI dan pihak lainnya yang peduli dengan tidak merugikan masyarakat sekitar desa wisata sebagai subyek maupun obyek pengembangan desa wisata. (Desa Wisata, 2010)
- Selanjutnya sangat disarankan untuk membuat Buku Petunjuk (informasi) mengenai Desa Wisata yang dikelola secara informatif (bermakna), komunikatif (mudah dipahami), dan atraktif (menarik). Buku Petunjuk dilengkapi pula dengan informasi produk wisata yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB (October 1999) Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank (Mimeo)
- Badan Pengembangn Kebudayaan dan Pariwisata. 2002. Pedoman Umum Pengembangan Pola Kemitraan Usaha di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Bappenas.Komite Penanggulanagn Kemiskinan.2002.Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan
- Bartle, Phil, Key Words C of Community, Development, Empowerment, Participation: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).
- Cook, James B, 1994, Community Development Theory, Community Development Delivery, 2004, Pemberdayaan Masyarakat, http://www.delivery.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summary.htm
- Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Laporan Pendahuluan, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pundong, 2000.
- Giardi, G.C, 2001, Caught in Nets: A Critical Examination of the Use OF The Concept of "Network" In Community Development Studies, Community Development Journal Vol. 36 (1): 63- 71, January 2001, Oxford University Press).
- Lukito, Maret & Akbar, Laporan Akhir, Desa Wisata Sambi Sebagai Alternatif Obyek Wisata Minat Khusus, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.

Mongid, A. Gerakan Terpadu Mengatasi Kemiskinan (Gerdu Taskin). Menko Kesra dan Taskin (Mimeo) Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).

Muliawan, Hernowo. Perencanaan dan Perancangan Desa Wisata, Makalah Diklat Bidang Pariwisata 2000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. DIY

Purwanggono, Djoko, Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, makalah Diklat Kepariwisata 2009, Dinas Pariwisata dan Budaya Sleman.

Purwanggono, Djoko, Teknik Pemanduan Wisata untuk Desa Wisata, Makalah Diklat 2011. Bintang Kepri.

Suansri, Potjana, Community Based Tourism Handbook (Thailand: REST Project, 2003).

Todaro, M.P. (1995) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1, Edisi Keempat. Penerbit Erlangga.

www.bps.go.id

www.indonesia.go.id

www.wikipedia.or.id

LAMPIRAN

Kerangka

Operasional (implementasi)

Pengelolaan Desa Wisata

A. MEMBUAT BUKU PETUNJUK INFORMASI TENTANG DESA WISATA (yang dikelola)

I. Pendahuluan

1. Nama Desa Wisata
2. Peta/ Denah Lokasi
3. Latar Belakang
4. Gambaran Singkat tentang Desa Wisata
5. Sejarah Desa Wisata

II. Visi Dan Misi

III. Potensi Desa Wisata

1. Tipe Penduduk
 - a. Jumlah
 - b. Asal-usul
 - c. Komposisi
 - d. Kehidupan sehari-hari (mata pencaharian, sosial, ekonomi, budaya, politik, religi)
2. Potensi Daya Tarik Wisata
 - a. Atraksi
 - a.1 Alam
 - a.2 Budaya
 - a.3 Buatan manusia (monument/ Arsitektur/ kerajinan/ Home industry/ dan lain-lain.)

- b. Akses (Berbagai Kemudahan Akses)
- c. Amenitas (fasilitas pendukung)
- d. Aktifitas (Kegiatan Wisata yang dapat dilakukan)

3. Potensi Daya Tarik Non Fisik

(Legenda, cerita rakyat, aturan tak tertulis/ hal-hal yang ditabukan).

4. Pengelola

- a. Nama pengelola dan jajaran pengurus
- b. Kesekretariatan dan pusat layanan info
 - Alamat dan contact person
 - Web, email, . . .
- c. Jam buka (office hour)
- d. Aturan/ Tata tertib

IV. PENUTUP

1. Kesan
 2. Pesan
 3. Harapan
- Lampiran-lampiran
1. Foto potensi
 2. Surat Pengukuhan
 3. Piagam/Serifikat/Penghargaan
- (G. Djoko. P, 2013)

B. MEMBUAT BROSUR INFO PRODUK

- Nama Produk Tour
- Kode Produk Tour (code of Tour)
- Alur Kunjungan (start/ finish)
- Durasi Tour
- Minimum Pax (jumlah orang)
- Harga Tour per pax
- Persyaratan dan kondisi
- Harga Tour Termasuk
- Harga Tour Tidak Termasuk
- Pembatalan
- Pembayaran
- Validitas
- Alamat dan contact person

(Disamping itu dapat pula disusun/ dikemas paket-paket wisata yang dibuat menyesuaikan)

(G. Djoko. P, 2012)

C. KOLOM IDENTIFIKASI POTENSI DAYA TARIK

(sumber: fokus diskusi pengelolaan Desa Wisata, 2008)

1. Objek dan Atraksi Wisata (ODTW)

Nama ODTW	Diskripsi	Potensi Daya Tarik	Jenis	Lokasi	Aktifitas yang dapat dilakukan	Pengelolaan
1.						
2.						

3.						
----	--	--	--	--	--	--

2. Akomodasi (Hotel/ Penginapan/ Homestay/ ...)

Nama	Jenis	Alamat dan Kontak person	Jumlah Kamar	Fasilitas/ Pelayanan	Harga
1.					
2.					
3.					

3. Transportasi

Nama (Pemilik Transportasi)	Alamat dan Kontak Person	Jenis Armada	Harga/ Sewa	Fasilitas
1.				
2.				
3.				

4. Makanan/ Minuman (Khas)

Nama	Deskripsi	Alamat	Keterangan (lain-lain)
1.			
2.			
3.			

5. Souvenir/ Handycraft/ Home Industri

Nama	Deskripsi	Alamat	Fasilitas
1.			
2.			
3.			

6. "Event" (Kejadian/ Peristiwa Penting), seperti: upacara/ adat/ dll.

Nama (event)	Deskripsi	Alamat	Pelaksanaan			Keterangan (lain-lain)
			Periode	Lokasi	Waktu	
1.						
2.						
3.						

7. "Kesenian"

Nama Kesenian	Deskripsi	Pelaksanaan	Harga	Lain - lain
1.				
2.				
3.				

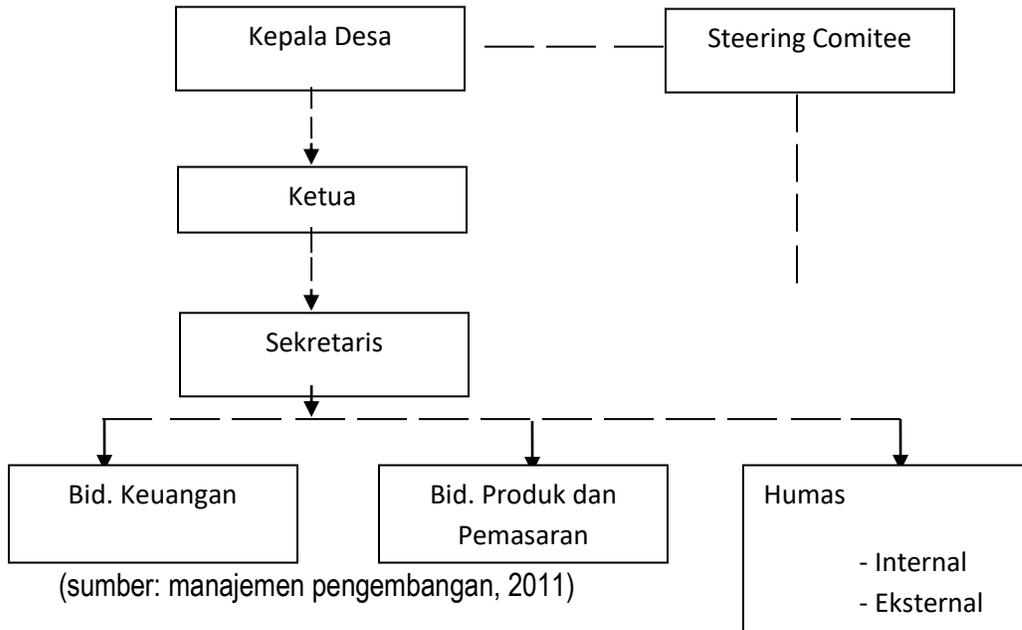
8. "Pertanian"/ perikanan/ peternakan

Nama (Produk)	Deskripsi	Musim	Harga	Lain - lain
1.				
2.				
3.				

9. Dan lain – lain

D. KOLOM USULAN LEMBAGA PENGELOLA DAN STRATEGI PEMASARAN

USULAN LEMBAGA PENGELOLA:



STRATEGI PEMASARAN



(sumber: manajemen pengembangan, 2009)

